

## METODE PARTICIPATION PLANNING DALAM KAMPONG UP-GRADING

**Maria Damiana Nestri Kiswari**

Program Studi Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Katolik Soegijapranata  
Jl. Pawiyantan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur Semarang 50234 Telp 024 8441555  
Email: [nest\\_md@yahoo.com](mailto:nest_md@yahoo.com)

### Abstrak

*Program perbaikan kampung sampai dengan saat ini masih dibutuhkan meskipun Indonesia telah mengenal program tersebut lebih dari tiga puluh lima tahun. Masih banyak lingkungan permukiman khususnya di perkotaan yang memiliki permasalahan, baik fisik maupun non fisik. Keterlibatan masyarakat setempat mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan program, sangat diperlukan agar program tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Partisipasi masyarakat ini dalam setiap program kegiatan akan meningkatkan rasa memiliki terhadap program tersebut. Kondisi lingkungan permukiman yang sudah di "up-grade" dapat terus terjaga dan masyarakat itu sendiri yang menjaga kualitas lingkungan permukiman mereka.*

**Kata kunci:** *partisipasi masyarakat ; proses perencanaan ; perbaikan lingkungan*

### Pendahuluan

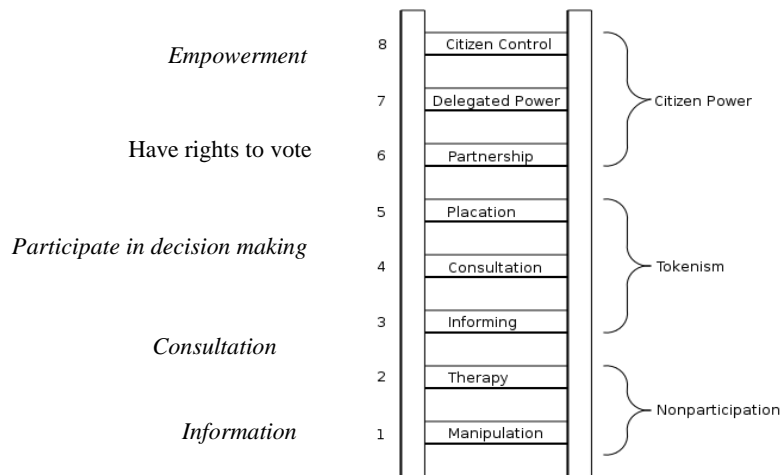
Program perbaikan kampung masih terus diperlukan sampai dengan saat ini. Kampung Improvement Program (KIP) merupakan project pertama di dunia yang dilaksanakan pada tahun 1969. Project tersebut bertujuan untuk menyediakan dan memperbaiki infrastruktur lingkungan permukiman seperti jalan, selokan, jaringan air bersih, fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus), dan fasilitas lainnya.

Mengapa program seperti perbaikan kampung sampai saat ini masih dibutuhkan? Jika kita melihat kondisi permukiman – permukiman saat ini, khususnya di perkotaan masih banyak yang membutuhkan program perbaikan. Namun demikian tidak hanya program yang memperbaiki dan menyediakan fasilitas-fasilitas permukiman saja yang diperlukan saat ini. Faktor manusia, penghuni suatu permukiman, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan dan keberhasilan suatu program perbaikan lingkungan.

### Teori Participation Planning

Participation planning atau yang disebut dengan perencanaan partisipatif adalah proses perencanaan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama secara aktif dari suatu program. Masyarakat tidak hanya menerima program yang sudah dibuat, namun mereka terlibat dari tahap persiapan program hingga tahap akhir program serta m. Menurut Godschalk dalam Fageance (1977) partisipasi masyarakat disebut sebagai pengambilan keputusan secara bersama, antara masyarakat dan perencana. Selanjutnya, Soetrisno (1995) menyebutkan bahwa partisipasi dalam proses pembangunan bukanlah merupakan mobilisasi manusia, namun merupakan sebuah bentuk kerjasama antara pemerintah dan warganya dalam hal perencanaan, implementasi dan pembiayaan.

Bentuk partisipasi tersebut memiliki tingkatan, dilihat dari kapasitas dan otoritas masyarakat. Menurut Sherry R. Arnstein terdapat 8 (delapan) tingkat partisipasi masyarakat. Tingkatan terbawah disebut dengan *Manipulation*. Pada tingkat ini masih dianggap tidak ada partisipasi karena dominasi pemimpin dalam mengambil keputusan. Sedangkan tingkatan tertinggi, *Citizen Control*, merupakan bentuk partisipasi masyarakat penuh. Artinya bahwa masyarakat memiliki hak suara utama atau sepenuhnya menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Kelompok *Tokenism*, yang terdiri dari tingkat 3 sampai tingkat 5, merupakan tahapan di mana diberikan kesempatan berpartisipasi namun masih terbatas. Ada phase-phase tertentu di mana masyarakat ikut terlibat sepenuhnya, dan ada phase yang lain di mana masyarakat tetap terlibat namun tidak dapat ikut mengambil keputusan. Seperti dalam tingkat 3, *Informing*, pemerintah atau perencana memberitahukan suatu informasi program kepada masyarakat. Masyarakat dimintai tanggapan, pendapat dan masukannya, tetapi masyarakat tidak memiliki wewenang untuk mempengaruhi hasil keputusannya.



**Gambar1.** Tingkatan partisipasi Ladder of Particiaption)  
(Source : Arnstein, S.R, 1969, Vol.35, No 4, p.2 )

Jika melihat dari karakter dari aktivitas masyarakat yang terlibat dalam suatu perencanaan partisipatif, ada beberapa jenis partisipasi masyarakat sebagai berikut :

**Tabel 1.** Types of participation

Participation Type	Characteristic
Passive participation	People participate by living in the area of the project. They may be told what is going to happen or has already happened but will have no other input
Participation for material incentive	People participate by being paid for labor in food or cash, for a pre-determined project. This may be as a "community" or as groups.
Participation by resource contribution	People participate by contributing a resource such a labor or money, to a pre-determined project.
Participation by consultation	People participate by being consulted (perhaps with options) on projects where the majority of the decisions have been made. Their view may/may not be considered.
Interactive participation	People participate by join with external professionals in analysis of their situation, developing action plans and determining common projects.
Spontaneous mobilization	People participate by taking their own initiative independent of external professionals to change their situation. This may lead to self-help projects or request to other institutions for assistance

Sumber : Wattam, M, 1998, IT Transport Ltd

**Metoda Participation Planning**

Dari pembahasan teori participation planning, kita akan dibahas mengenai kelompok *Tokenism*. Dalam kelompok ini ada tiga tahapan yaitu *Informing*, *Consultation* dan *Placation*. Pembahasan ini menarik karena dalam kelompok ini banyak bentuk pembelajaran masyarakat dalam proses perencanaan. Pada tingkat terakhir, yaitu *Placation*, masyarakat sudah dianggap siap untuk berpartisipasi secara penuh menjadi partner pemerintah atau perencana. Dalam perencanaan terdapat tiga phase pokok yaitu persiapan, pemetaan, dan penyusunan rencana program.

1. Persiapan

Dalam tahap ini diadakan kegiatan sosialisasi yaitu kegiatan pengenalan program kepada masyarakat. Memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga memiliki kesamaan pandangan, prinsip dan bagaimana program tersebut akan dilaksanakan. Dari masyarakat tersebut dibentuk kelompok-kelompok berdasarkan bidang kerjanya.

Contoh kelompok – kelompok kerja :

- Kelompok tata ruang; lingkup kerja mengenali kondisi tata ruang wilayah, menganalisis pengembangan dan pemanfaatan ruang dan menyusun rencana alokasi pemanfaatan ruang.

- Kelompok sarana dan prasarana lingkungan; lingkup kerja : untuk mengenali kondisi jalan, saluran drainase dan jembatan, menganalisis kondisi saat ini dan membuat kesepakatan rencana perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana tersebut.
- Kelompok kerja sanitasi dan air bersih; lingkup kerja : mengenali dan menganalisis kondisi pelayanan sanitasi dan air bersih yang ada di masyarakat, yang selanjutnya menyusun rencana perbaikan pelayanan sanitasi dan air bersih tersebut.
- Kelompok pelayanan publik; lingkup kerja : pelayanan pengelolaan sampah lingkungan, pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan keamanan lingkungan. Melakukan identifikasi terhadap kondisi saat ini, menganalisis dan kemudian membuat rencana pengembangannya.
- Kelompok ekonomi; lingkup kerja: mengenali, menganalisis dan menyusun rencana pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan home based enterprises / UKM (Usaha Kecil Menengah).
- Kelompok kelembagaan, lingkup kerja : untuk mengupayakan good governance dalam masyarakat.

Dengan demikian suatu program untuk meng'up-grade' suatu kawasan permukiman dapat menyentuh semua aspek.



**Gambar 2.** Media sosialisasi berupa poster, spanduk, stiker atau brochure



**Gambar 3.** pembentukan kelompok kerja untuk masing-masing aspek yang akan dibahas dalam suatu program "kampong up-grading"

Kelompok yang sudah terbentuk tersebut dalam melakukan tugasnya didamping oleh fasilitator-fasilitator dan berdialog dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait.

## 2. Pemetaan

Pemetaan merupakan tahapan untuk mengenal kondisi suatu kawasan. Masyarakat diajak untuk menggali potensi yang dimiliki untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi suatu program untuk memperbaiki lingkungan tempat tinggal mereka baik secara fisik maupun non fisik.

Pelaksanaan melalui rangkaian FGD (Focus Group Discussion) masyarakat : membuat peta potensi dan masalah yang ada pada wilayah mereka; inventarisasi masalah yang meliputi penyebab masalah dan akibat yang ditimbulkan; inventarisasi potensi dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang ada.

Kelompok – kelompok kerja yang sudah terbentuk bekerjasama dengan memberikan pendampingan kepada warga yang lain dalam menganalisis dan menentukan rencana pengembangan lingkungan tempat tinggalnya.



**Gambar 4.** suatu rembug warga yang membahas kondisi lingkungan permukiman mereka dengan cara menginventarisasi dan membuat peta untuk potensi dan permasalahan tersebut.



**Gambar 5.** suatu kegiatan FGD dengan menggunakan kartu-kartu yang menunjukkan sebab dan akibat suatu masalah lingkungan dan solusi yang memungkinkan.

Di samping itu dalam kegiatan pemetaan ini juga diberikan pemahaman terhadap peraturan, rencana pengembangan dan kebijakan lainnya seperti peraturan tentang garis sepadan, rencana detail tata ruang dan lainnya.



**Gambar 6.** forum sosialisasi mengenai peraturan tata bangunan dari SKPD terkait

Setelah memahami peraturan-peraturan dan kebijakan, serta menggali potensi dan permasalahan yang dimiliki maka masyarakat diajak untuk merumuskan visi pembangunan wilayah mereka ke depan. Dalam menggali visi pembangunan dari masyarakat tersebut dapat dilakukan berbagai cara sesuai dengan kelompok umur dan pendidikannya. Misalnya sebagai berikut: untuk anak-anak SD diadakan lomba menggambar atau lomba membuat tulisan tentang Kampung Idaman; untuk kelompok ibu-ibu melalui kegiatan kelompok PKK dapat diadakan lomba pemanfaatan pekarangan rumah, dan lain-lain.



**Gambar 7.** suatu kegiatan lomba gambar anak-anak untuk mendapatkan masukan visi dari kelompok anak.



### 3. Penyusunan rencana program

Merupakan tahapan akhir dari perencanaan. Masyarakat membahas berbagai kebutuhan pembangunan, menyepakati prioritas pembangunan, dan kemudian menyusun rencana pembangunan jangka pendek dan menengah termasuk sumber pembiayaannya.

Pelaksanaanya berupa kegiatan semacam rembug warga diselenggarakan untuk menyusun rencana program. Dalam forum rembug ini masyarakat dapat dibagi menurut wilayah administratifnya (RW/RT) atau menurut teritorialnya. Mereka membuat rencana untuk daerahnya masing. Masing – masing mempresentasikan dan kemudian disepakati daerah mana yang menjadi prioritas pembangunan. Pertimbangan menentukan prioritas adalah bahwa kegiatan pembangunan tersebut : memiliki cakupan yang luas, menjawab permasalahan yang dihadapi, memberikan peluang untuk pengembangan ekonomi masyarakat, didukung oleh masyarakat dan sejalan dengan kebijakan atau rencana pembangunan di atasnya dari pemerintah.



**Gambar 8.** kegiatan pameran yang diadakan warga untuk mempromosikan produk unggulan dari wilayahnya sekaligus mempublikasikan rencana pembangunan yang sudah mereka susun.

Ketika rencana program pembangunan untuk perbaikan lingkungan permukiman sudah tersusun baik itu untuk jangka pendek maupun jangka menengah, maka diadakan kembali kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi untuk rencana pembangunan tersebut berupa pameran yang bertujuan selain untuk publikasi juga untuk mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat umum. Selain itu juga untuk menarik pihak swasta atau investor mendukung program pembangunan yang sudah disusun. Sosialisasi yang lebih sederhana dapat juga ditempuh melalui pemasangan poster atau baliho, membagikan stiker atau leaflet.

Dari penjelasan mengenai tahapan dalam proses perencanaan partisipatif ini, dapat diketahui berbagai aktivitas yang mungkin untuk dilakukan. Sesuai dengan tabel Types of Participation, maka proses ini merupakan *Participation by Consultation*. *Participation by consultations* tersebut karena ada tim fasilitator yang mendampingi dan tenaga ahli lain seperti SKPD, pihak universitas yang ikut membantu dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian masyarakat yang terlibat dari awal proses hingga akhir perencanaan perbaikan lingkungan permukiman, akan terus merasa memiliki program tersebut hingga terwujud apa yang menjadi harapan mereka. Di samping itu masyarakat juga memperoleh pemahaman mengenai pengembangan dan perencanaan wilayah sehingga ke depannya mereka dapat lebih bijaksana dalam memperlakukan lingkungan tempat tinggal mereka. Proses ini bila dilakukan dengan berkesinambungan akan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kapasitas manusia serta kualitas lingkungan tempat tinggalnya.

### Daftar Pustaka

Arnstein, S.R., (1969), “*A Ladder of Citizen Participation*”, JAIP, Vol.35, No.4, July, 1969, p.2

Asmara, Bambang Jati (2005), “*Community Participation on Sustaining the Infrastructure of the Kampung Improvement Program (KIP)*”, Master Program Thesis, Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS), Rotterdam

Bryson, John M., Robert C. Einsweiler (1988), “*Strategic Planning Threats and Opportunities For Planners*”, Chapter 1, Introduction, Planners Press Chicago, pp. 1-2

Davidson, Forbes (1996), “*Planning for Performance*”, Habitat International Vol. 20, Elsevier UK No.3, pp 445-462

Fageance, M (1977), *“Citizen participation in Planning”*, Pergamon Press, Oxford, England

European Commision (2000), *“Towards Sustainable Urban Development A Strategic Approach”*, Consultative Guidelines for Urban Development Co-Operation, Chapter 2, pp. 10-11

Soetrisno, L, (1995), *“Menuju Masyarakat Partisipatif”*, Kanisius, Yogyakarta

Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat, ( 2007), *“Pedoman Umum Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri”*, Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya

Wattam, M, (2001), *“Community participation in rural transport infrastructure”*, Rural Travel and Transport Program Availabel on  
[Http://www.transportlinks.org/rtkb/english/module%202/2\\_6a%20community%20participation.pdf](http://www.transportlinks.org/rtkb/english/module%202/2_6a%20community%20participation.pdf).

Warner, M., Robb, C. (1996), *Strategic Development Planning at the Community Level: A Modification to Participatory Planning*, Community Development Journal, Vol. 31 no.4, pp. 330-335

-, (2006), *World Urban Forum III An Internatinal UN-Habitat Event on urban Sustainability*, UN-Habitat